

Ruang Publik Deliberatif Digital: Analisis Platform Symbolic ID dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas

Dimas Rahman Rizqian

Sosiologi, Universitas Jenderal Soedirman

ARTICLE INFO

Kata kunci:
demokrasi deliberatif;
ruang publik digital;
rasionalitas komunikatif;
Jürgen Habermas

Keywords:
deliberative democracy;
digital public sphere;
communicative rationality;
Jürgen Habermas

Email :
dimas.rizqian@mhs.unsoe
d.ac.id

ABSTRACT

Artikel ini mengeksplorasi penerapan konsep demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dalam platform digital Symbolic ID. Dengan memosisikan kebermanfaatan sebagai parameter utama interaksi, Symbolic ID berupaya membangun ruang publik yang inklusif dan bermakna. Tulisan ini menganalisis bagaimana fitur metakognitif serta komponen Insignia Social pada platform tersebut beresonansi dengan gagasan Habermas mengenai rasionalitas komunikatif, diskursus publik, dan partisipasi aktif warga. Hasil analisis menunjukkan bahwa Symbolic ID merepresentasikan sebuah upaya praktis dalam mendorong terbentuknya deliberasi demokratis di ruang digital, khususnya di tengah kebisingan informasi dan polarisasi yang kerap mendominasi wacana daring.

This article explores the application of Jürgen Habermas's deliberative democracy in the digital platform Symbolic ID. By positioning "usefulness" as the primary interaction parameter, Symbolic ID aims to construct an inclusive and meaningful public sphere. This paper analyzes how metacognitive features and the "Insignia Social" component of the platform resonate with Habermas's ideas of communicative rationality, public discourse, and active participation. The findings indicate that Symbolic ID represents a practical attempt to foster democratic digital deliberation amid the noise and polarization of online discourse.

Copyright © 2025 Jurnal Sosial Politik dan Hukum.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](#)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik komunikasi sosial dan politik, baik di Indonesia maupun secara global. Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga merekonstruksi struktur sosial dan dinamika kehidupan publik secara keseluruhan (Dwiyanti et al., 2024).

Dalam konteks komunikasi sosial, media digital – khususnya media sosial – telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Komunikasi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu (Anantama, 2024). Keberadaan platform digital memungkinkan individu untuk saling terhubung tanpa harus bertatap muka, menciptakan jaringan sosial yang luas dan dinamis. Namun, perubahan ini juga menggeser struktur sosial masyarakat, di mana data pribadi kini menjadi komoditas baru dalam ekonomi digital. Ketergantungan pada algoritma telah membentuk pola interaksi baru yang tidak sepenuhnya disadari oleh pengguna, sehingga algoritma secara diam-diam mengarahkan keputusan sosial dan ekonomi sehari-hari.

Disrupsi digital turut mempercepat pergeseran dari masyarakat informasi menuju masyarakat automasi. Pandemi Covid-19 menjadi katalisator penting dalam mempercepat adopsi teknologi digital, terutama dalam aspek komunikasi, pendidikan, dan pekerjaan (Wiratno, 2024). Otomatisasi berbagai proses kehidupan sehari-hari kini menjadi norma baru, menandai perubahan besar dalam budaya kerja, relasi sosial, dan bahkan tata nilai masyarakat.

Di ranah komunikasi politik, media sosial telah bertransformasi menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan opini, berdiskusi, serta terlibat secara aktif dalam dinamika politik (Wiranata, 2024). Platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook berperan sebagai kanal distribusi informasi politik yang bersifat visual, interaktif, dan real-time.

Transformasi ini memudahkan akses informasi, terutama bagi generasi muda yang lebih akrab dengan format digital.

Kampanye politik pun mengalami perubahan signifikan. Para kandidat dan tim sukses politik memanfaatkan media sosial untuk membangun citra, menyampaikan pesan, dan menjalin komunikasi langsung dengan pemilih. Kecepatan dan jangkauan media sosial membuat pesan-pesan politik dapat tersebar luas dalam waktu singkat. Akan tetapi, kemajuan ini juga membawa dampak yang kompleks. Informasi yang cepat menyebar tidak selalu disertai dengan verifikasi kebenaran, sehingga membuka ruang bagi disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Fenomena ruang gema (echo chamber) semakin memperkuat polarisasi opini dan menghambat dialog yang konstruktif antar kelompok masyarakat (Teja, 2025).

Selain itu, praktik manipulasi opini publik melalui buzzer politik dan intervensi algoritma menimbulkan tantangan serius terhadap kualitas demokrasi. Masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi yang objektif dan informasi yang telah dikondisikan untuk tujuan tertentu. Tingkat kepercayaan publik terhadap informasi politik yang bersumber dari media sosial pun cenderung rendah, menunjukkan adanya krisis validitas dalam komunikasi politik digital.

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan dinamika baru dalam praktik komunikasi sosial dan politik. Ruang-ruang virtual menjadi medan diskusi sekaligus konflik narasi yang kompleks. Dalam konteks tersebut, diperlukan model ruang digital yang memungkinkan keterlibatan publik yang lebih reflektif dan deliberatif. Salah satu platform yang berupaya menghadirkan ruang semacam itu adalah *Symbolic ID*, yang menjadikan “kebermanfaatan” sebagai basis interaksi (Ginancar, 2021).

Ruang publik merupakan sebuah konsep yang merujuk pada arena tempat individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berinteraksi, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat secara bebas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Jürgen Habermas, filsuf asal Jerman, yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dan diskursus publik sebagai elemen fundamental dalam kehidupan demokratis.

Menurut Habermas, ruang publik ideal adalah sebuah forum diskursus yang didasarkan pada argumentasi rasional, di mana masyarakat menyampaikan opini dan aspirasi dengan tujuan membangun kesepahaman bersama yang bersifat intersubjektif (Setiawan, 2023). Ruang ini, dalam pandangannya, seharusnya bersifat independen dari dominasi negara maupun pasar. Hanya dengan menjaga jarak dari kepentingan institusional dan komersial, masyarakat dapat menjalankan fungsi kritis dan mengawasi kebijakan pemerintah secara mandiri. Selain itu, ruang publik harus bersifat partisipatif dan inklusif, memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk terlibat dalam diskusi tanpa diskriminasi atas dasar identitas, status sosial, atau akses ekonomi.

Secara fungsional, ruang publik berperan sebagai tempat kontestasi gagasan, memungkinkan berbagai pihak untuk memperdebatkan isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan bersama. Namun, dalam realitasnya, tidak semua ruang publik mampu menjadi arena perdebatan yang sehat. Dalam banyak kasus, ruang tersebut berubah menjadi wahana promosi ide tanpa ruang bagi kritik dan dialog yang sejajar. Meskipun demikian, ruang publik tetap memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik. Pandangan dan aspirasi yang berkembang di dalamnya dapat memberikan tekanan sosial-politik yang mendorong perubahan kebijakan atau arah transformasi sosial yang lebih luas.

Di era digital, konsep ruang publik mengalami perluasan sekaligus transformasi yang signifikan. Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital telah mendemokratisasi akses terhadap ruang publik, memungkinkan partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan era sebelumnya. Akan tetapi, kemajuan ini tidak datang tanpa tantangan. Penyebaran hoaks, ujaran

kebencian, serta krisis etika komunikasi menjadi fenomena yang mengancam kualitas diskursus publik. Ruang publik digital tidak lagi hanya menjadi arena berbagi informasi dan pendapat, tetapi juga menjadi medan konflik narasi dan manipulasi emosi (Rizkiyah, 2025).

Salah satu tantangan utama dalam konteks ini adalah dominasi algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna. Algoritma tersebut cenderung memperkuat konten ekstrem, emosional, atau viral, yang justru mempersempit ruang diskusi rasional dan memperbesar polarisasi masyarakat. Krisis literasi digital dan lemahnya etika komunikasi semakin memperparah kondisi ini, menjadikan ruang publik digital rentan terhadap disinformasi, provokasi, dan perilaku agresif.

Gagasan ruang publik deliberatif telah lama diperkenalkan oleh Habermas (1984; 1996), yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dan partisipasi bebas dari dominasi dalam pembentukan opini publik. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana Symbolic ID mencoba menerapkan gagasan tersebut dalam konteks digital, serta melihat peluang dan tantangan pembentukan ruang publik deliberatif secara virtual sebagaimana juga telah dikaji oleh Dahlberg (2001) dan Yardi & boyd (2010) dalam konteks media sosial.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena sosial secara mendalam melalui telaah sistematis terhadap berbagai sumber pustaka. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya berupaya mengumpulkan informasi yang relevan dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah, tetapi juga menganalisis makna, konteks, serta hubungan antarkonsep yang muncul dari literatur tersebut. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang isu atau topik tertentu berdasarkan kajian teoretis dan hasil penelitian terdahulu, sehingga mampu membentuk landasan konseptual yang kuat bagi pengembangan gagasan dan rekomendasi ilmiah (Miles et al., 2013). Data diperoleh dari observasi langsung terhadap desain platform Symbolic IDE (Ginjar, 2021), dokumentasi fitur-fiturnya, serta referensi teoritis mengenai ruang publik digital dan pemikiran Habermas. Analisis dilakukan secara deduktif dengan mencocokkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif terhadap fitur dan praktik interaksi pengguna di platform tersebut (Shirky, 2009; Ainiyah, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Rasionalitas Komunikatif Habermas

Habermas (1984) menekankan bahwa komunikasi yang sehat harus bebas dari paksaan dan diarahkan pada pencapaian pengertian bersama. Dalam konteks ruang digital, ini berarti platform harus mendorong keterlibatan reflektif, partisipasi setara, dan argumen berbasis nalar. Pandangan ini juga sejalan dengan konsep *ideal speech situation* yang memungkinkan semua peserta berdialog tanpa tekanan struktural (Habermas, 1996).

Prinsip rasionalitas komunikatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas merupakan konsep fundamental dalam teorinya tentang tindakan komunikatif. Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi yang berlangsung secara rasional, terbuka, dan bebas dari dominasi sebagai syarat untuk mencapai pemahaman bersama dan konsensus sosial yang sah. Dalam pandangan Habermas, komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan juga sebuah proses dialogik yang melibatkan klaim-klaim kesahihan yang dapat dipertanggungjawabkan secara intersubjektif (Harnowo, 2020).

Salah satu ciri utama dari tindakan komunikatif adalah kehadiran klaim-klaim kesahihan yang melekat dalam setiap pernyataan komunikatif. Klaim ini mencakup klaim kebenaran yang berkaitan dengan fakta objektif, klaim kebenaran normatif yang menyangkut nilai atau aturan moral yang dianggap pantas, serta klaim kesungguhan yang mencerminkan kejujuran atau ketulusan pembicara. Komunikasi yang ideal terjadi apabila klaim-klaim ini dapat diuji dan diterima secara bersama melalui proses dialog yang terbuka dan setara, bukan melalui paksaan atau manipulasi.

Dalam kerangka rasionalitas komunikatif, dialog harus bersifat inklusif dan intersubjektif. Artinya, setiap individu yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, dan memahami sudut pandang pihak lain. Proses komunikasi semacam ini menuntut adanya kesetaraan posisi dan penghormatan terhadap otonomi peserta, karena hanya dalam kondisi tersebut dialog dapat menjadi sarana yang sah untuk membangun pemahaman bersama (Silitonga, 2022).

Tujuan utama dari tindakan komunikatif bukanlah kemenangan argumentatif, melainkan tercapainya konsensus yang dicapai melalui kesadaran bersama atas makna dan nilai yang dibicarakan. Pemahaman bersama yang dibangun dari proses ini menciptakan dasar yang legitim bagi kerja sama sosial, pengambilan keputusan kolektif, dan penyelesaian konflik yang adil. Oleh karena itu, komunikasi yang terarah pada konsensus harus terhindar dari bentuk-bentuk dominasi, baik yang bersifat struktural, ideologis, maupun simbolik (Pitriadi et al., 2025).

Kebebasan dari dominasi menjadi syarat penting agar komunikasi dapat berlangsung secara rasional. Peserta dialog harus merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan jujur, tanpa takut akan tekanan, intimidasi, atau marginalisasi. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi ruang etis yang memungkinkan pembentukan kehendak bersama yang reflektif dan demokratis.

Lebih jauh, Habermas menempatkan rasionalitas komunikatif sebagai landasan normatif bagi masyarakat demokratis. Prinsip ini mendukung penegakan hak asasi manusia, transparansi publik, dan legitimasi politik yang berbasis partisipasi warga. Dialog yang terbuka dan inklusif menjadi mekanisme utama dalam membentuk keputusan yang sah secara moral dan sosial, karena ia mengakui martabat dan suara setiap individu.

Dengan demikian, rasionalitas komunikatif tidak hanya menjadi teori tentang cara berkomunikasi, tetapi juga menjadi kerangka etis dan politis yang memberikan arah bagi pembangunan masyarakat yang adil, demokratis, dan partisipatif. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya melalui komunikasi yang jujur, egaliter, dan terbuka, masyarakat dapat membangun dasar yang kokoh untuk kerjasama sosial dan kehidupan bersama yang bermartabat.

Metakognisi dan Partisipasi Aktif

Symbolic ID mengadopsi pendekatan metakognitif dengan mendorong pengguna untuk mengevaluasi dan merefleksikan kontribusinya. Hal ini memperkuat kualitas komunikasi publik sebagaimana disarankan oleh Dahlberg (2001), bahwa kesadaran reflektif merupakan kunci utama dalam membentuk diskursus demokratis.

Dalam konteks pembelajaran serta keterlibatan sosial dan politik, metakognisi dan partisipasi aktif merupakan dua konsep yang saling terkait dan saling memperkuat.

Metakognisi merujuk pada kemampuan individu untuk menyadari, mengatur, dan mengendalikan proses berpikir serta strategi belajar yang digunakannya. Kemampuan ini mencakup kesadaran atas apa yang diketahui dan tidak diketahui, evaluasi terhadap pemahaman, serta refleksi terhadap cara-cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas belajar maupun pengambilan keputusan (Manganti, 2023).

Sementara itu, partisipasi aktif mengacu pada keterlibatan langsung dan penuh kesadaran seseorang dalam suatu proses, baik dalam ranah pendidikan, sosial, maupun politik. Partisipasi ini menuntut lebih dari sekadar kehadiran fisik; ia melibatkan komitmen intelektual dan emosional terhadap isu atau kegiatan yang diikuti. Dalam praktiknya, partisipasi aktif mencerminkan bentuk keterlibatan yang kritis, responsif, dan bertanggung jawab (Solin, 2025).

Keterkaitan antara metakognisi dan partisipasi aktif terletak pada bagaimana kesadaran dan pengelolaan pikiran dapat mendorong kualitas keterlibatan individu dalam ruang-ruang partisipatif. Individu yang memiliki kapasitas metakognitif tinggi cenderung mampu memahami tujuan dan konteks keterlibatan mereka secara lebih jernih. Mereka dapat mengatur strategi komunikasi yang efektif, menilai informasi secara kritis, dan menyumbangkan pandangan yang lebih reflektif dalam diskusi atau proses pengambilan keputusan (Kadir, 2022).

Dalam konteks kehidupan publik dan demokrasi, peran metakognisi menjadi semakin penting. Warga yang mampu berpikir tentang cara mereka berpikir cenderung lebih siap untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses kebijakan publik. Metakognisi memungkinkan mereka menavigasi kompleksitas argumen, menghindari penyerapan informasi secara pasif, dan menilai dampak sosial dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, partisipasi aktif yang didukung oleh kesadaran metakognitif dapat memperkuat kualitas dialog publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat.

Hal ini menjadi semakin relevan di tengah maraknya informasi digital, terutama bagi generasi Milenial dan Gen Z yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat terhubung dengan teknologi dan media sosial. Di tengah banjir informasi yang sering kali kabur batas antara fakta dan disinformasi, kemampuan metakognitif membantu individu untuk menyaring informasi secara kritis, mengenali bias, dan menghindari jebakan hoaks serta polarisasi yang merusak kualitas ruang publik. Dengan demikian, metakognisi tidak hanya menjadi alat berpikir individual, tetapi juga pilar penting dalam membentuk kultur politik yang sehat dan dialogis.

Kebermanfaatan Komunal melalui Insignia Social

Fitur *Insignia Social* memfasilitasi penilaian kolektif terhadap kebermanfaatan suatu gagasan. Alih-alih mengejar viralitas semu, Symbolic ID mendorong pengguna untuk membagikan pengetahuan yang membangun dan berdampak (Alpian & Anggraeni, 2019). Ini menciptakan ruang yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga edukatif dan produktif (Agustina et al., 2019).

Konsep kebermanfaatan komunal merujuk pada nilai atau manfaat yang dirasakan secara kolektif oleh suatu komunitas atau kelompok sosial. Kebermanfaatan ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi lebih menekankan pada dampak positif

yang dirasakan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, memperkuat solidaritas, serta membangun kohesi sosial. Dalam konteks ini, setiap aktivitas atau kebijakan yang mendorong kolaborasi, keadilan sosial, dan keseimbangan antaranggota masyarakat dapat dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap kebermanfaatan komunal. Prinsip ini menjadi penting dalam masyarakat yang plural dan dinamis, karena memperkuat kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan bersama lebih kokoh ketika dibangun secara gotong royong dan saling menguatkan (Arpan, 2025).

Dalam kaitannya dengan dinamika sosial, konsep insignia sosial juga memainkan peran penting. Insignia sosial merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan identitas, status, atau afiliasi seseorang dalam komunitas tertentu. Simbol ini bisa hadir dalam bentuk atribut fisik seperti seragam, lencana, atau lambang tertentu, maupun dalam bentuk non-fisik seperti gelar, sebutan kehormatan, atau hak istimewa yang melekat pada peran sosial tertentu. Keberadaan insignia sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat pengenalan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan kebersamaan di antara anggota komunitas. Ia menjadi penanda keanggotaan yang memberi makna pada relasi sosial serta memperkuat legitimasi terhadap posisi atau kontribusi individu dalam kelompok (Wirjawan, 2021).

Baik kebermanfaatan komunal maupun insignia sosial menunjukkan bagaimana dimensi simbolik dan praktis saling berkaitan dalam membentuk struktur sosial yang kohesif. Kebermanfaatan komunal mengikat masyarakat melalui tujuan bersama yang bersifat substansial, sedangkan insignia sosial mengikat melalui pengakuan simbolik atas keanggotaan dan peran dalam komunitas. Ketika keduanya berjalan secara selaras, masyarakat dapat membangun tatanan sosial yang lebih solid, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Ruang Publik Virtual yang Inklusif

Ruang publik virtual yang inklusif merupakan wujud transformasi digital dari ruang bersama yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa pengecualian. Dalam konteks ini, inklusivitas menjadi prinsip utama yang menekankan pentingnya aksesibilitas, kenyamanan, dan kesetaraan hak bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia, kelompok minoritas, dan komunitas keagamaan. Gagasan ini merupakan kelanjutan dari konsep ruang publik fisik yang berkeadilan dan ramah bagi seluruh warga, yang kini diperluas ke ranah digital seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Srihono & Magalhaes, 2024).

Aksesibilitas menjadi aspek pertama yang harus dipenuhi dalam merancang ruang publik virtual yang benar-benar inklusif. Hal ini mencakup penyediaan fitur-fitur teknis yang memungkinkan pengguna dengan kebutuhan khusus untuk mengakses konten dan berinteraksi secara setara. Fitur seperti teks alternatif untuk gambar, navigasi yang sederhana, dan dukungan terhadap teknologi asistif menjadi bagian penting dari desain inklusif. Dalam konteks Indonesia, kewajiban untuk menyediakan ruang publik yang aksesibel bagi difabel juga telah diatur dalam berbagai regulasi, sehingga implementasinya dalam ruang digital merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan penyedia platform (Az-Zahra & Ulimaz, 2024).

Selain itu, ruang publik virtual yang inklusif harus menjamin kesetaraan dan mendorong partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Tidak hanya terbuka bagi mereka yang secara sosial dan ekonomi dominan, ruang ini juga harus memberi tempat yang layak bagi suara kelompok marginal, termasuk komunitas agama dan etnis minoritas. Ruang digital semacam ini dapat menjadi wadah interaksi sosial yang sehat, di mana identitas dan ekspresi budaya atau keagamaan dapat diungkapkan secara konstruktif, tanpa takut dikucilkan atau direpresi.

Agar prinsip inklusivitas ini dapat terjaga, pengelolaan dan moderasi ruang publik virtual harus dilakukan secara adil dan transparan. Tidak cukup hanya menyediakan akses teknis; perlu ada kebijakan yang melindungi pengguna dari diskriminasi, ujaran kebencian, dan bentuk kekerasan simbolik lainnya. Pengelola ruang publik digital memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer yang aman, ramah, dan mendukung keterlibatan yang setara dari semua pihak.

Fasilitas pendukung dalam ruang virtual juga memiliki peranan yang sebanding dengan infrastruktur fisik dalam ruang publik konvensional. Misalnya, sebagaimana taman kota menyediakan jalur landai dan kursi khusus bagi lansia dan difabel, platform digital juga perlu menyediakan fitur yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berbeda. Desain yang inklusif bukan hanya soal estetika antarmuka, tetapi juga tentang keadilan fungsional yang memungkinkan semua orang terlibat secara bermakna (Keriapy, 2022).

Manfaat dari keberadaan ruang publik virtual yang inklusif sangat luas. Ruang ini dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi tanpa hambatan geografis atau fisik. Ia juga berfungsi sebagai media interaksi sosial yang dapat memperkuat identitas komunitas serta menjadi sarana penyebaran nilai-nilai positif. Dalam konteks keagamaan, misalnya, komunitas Kristen dapat menggunakan ruang digital untuk memperkuat relasi antaranggota, menyampaikan pesan moral, dan membangun solidaritas sosial secara lebih luas. Di sisi lain, platform seperti Instagram menunjukkan bagaimana ruang publik virtual juga berperan dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Penyebaran visual destinasi wisata melalui media sosial telah terbukti efektif dalam meningkatkan minat kunjungan dan menggerakkan ekonomi daerah.

Ruang publik virtual yang inklusif bukan hanya ruang digital yang dapat diakses secara teknis, melainkan juga ruang sosial yang memungkinkan keberagaman terwakili dan partisipasi masyarakat terjamin. Dengan prinsip-prinsip aksesibilitas, kesetaraan, dan keterlibatan aktif sebagai fondasi, ruang publik digital dapat menjadi arena bersama yang memperkuat demokrasi, solidaritas sosial, dan pembangunan yang berkeadilan bagi semua (Tullah, 2024).

Dengan mendorong diskusi berbasis kontribusi bermakna, Symbolic ID menjauh dari budaya debat dangkal yang sering ditemukan di media sosial. Ini adalah bentuk ruang publik virtual yang berupaya memenuhi kondisi ideal deliberasi: inklusif, bebas tekanan, dan rasional (Yardi & boyd, 2010). Upaya ini juga mencerminkan literasi media yang lebih tinggi sebagaimana ditekankan dalam studi literasi digital kontemporer (Rahmatunisa, 2017).

KESIMPULAN

Artikel ini menyoroti pentingnya membangun ruang publik digital yang tidak hanya terbuka, tetapi juga deliberatif dan bermakna, sebagaimana dirumuskan dalam teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Dengan mengkaji platform *Symbolic ID*, tulisan ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan sebagai prinsip interaksi, metakognisi sebagai pendekatan reflektif, dan fitur *Insignia Social* sebagai bentuk insentif komunal merupakan pilar penting dalam menciptakan komunikasi digital yang rasional, setara, dan bebas dari dominasi.

Symbolic ID membuktikan bahwa di tengah dominasi algoritma, polarisasi opini, dan rendahnya literasi digital, masih ada ruang untuk mempraktikkan bentuk komunikasi yang berorientasi pada konsensus, dialog terbuka, dan partisipasi inklusif. Platform ini tidak hanya menjadi contoh penerapan teori komunikasi dalam ruang digital, tetapi juga menawarkan arah baru bagi pembentukan budaya demokratis di era teknologi.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa *Symbolic ID* merupakan upaya konkret dalam membentuk ruang publik digital yang deliberatif, sesuai dengan kerangka pemikiran Habermas (1984; 1996). Dengan mengutamakan kebermanfaatan, metakognisi, dan partisipasi reflektif, platform ini menyuguhkan alternatif model komunikasi digital yang lebih bermakna dan demokratis.

Pengembangan lebih lanjut dapat diarahkan pada evaluasi dampak empiris dari platform tersebut terhadap perubahan perilaku komunikasi masyarakat digital dan potensinya sebagai medium pendidikan demokrasi (Shirky, 2009; Ainiyah, 2017). Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji dampak empiris dari ruang virtual deliberatif semacam ini terhadap perilaku komunikasi masyarakat digital dan sejauh mana platform seperti *Symbolic ID* dapat mendukung pendidikan demokrasi secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustina, S., Syahrul, R., Utami, D.P., & Yulianti, R. (2019). Pelatihan Penelusuran Informasi Elektronik dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Siswa SMPN. *JPIpteks: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 65–74.
- Ainiyah, N. (2017). Membangun Penguatan Budaya Literasi Media dan Informasi dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(1), 65–77. <https://doi.org/10.35316/jpii.v2i1.63>
- Alpian, Y., & Anggraeni, S. W. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), 66–72. <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.581>.
- Anantama, M. D. (2024). *Membaca Maryam Mengurai Konflik Sosial: Sebuah Eksplorasi Novel Karya Okky Madasari*. Penerbit Revormasi | PT. Revormasi Jangkar Philosophia. <https://www.revormasi.com/publications/618632/>
- Arpan, S. G. (2025). *Arah Perkembangan Laboratorium Hijau di Indonesia: Menuju Laboratorium Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Lebih Hijau*. Penerbit Revormasi | PT. Revormasi Jangkar Philosophia. <https://www.revormasi.com/publications/619060/>
- Az-Zahra, F., & Ulimaz, M. (2024). IDENTIFIKASI KUALITAS RUANG PUBLIK YANG INKLUSIF DI KAMPUNG WARNA-WARNI BALIKPAPAN. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 16(2), 217–228. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2024.016.02.10>
- Dahlberg, L. (2001). The Habermasian Public Sphere: A Specification of the Idealized Conditions of Democratic Communication. *Studies in Social and Political Thought*, 3(1), 31–59.
- Surnita Sandi Wiranata (2024). *Pemasaran Politik: Dari Konsep Hingga Praktiknya di Indonesia*. Penerbit Revormasi | PT. Revormasi Jangkar Philosophia. <https://revormasi.com/publications/618727/>

- Dwiyanti, A., Syahputra, M. R., & Widhiandono, D. (2024). PERSEPSI MAHASISWA TERKAIT PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SALURAN PENYEBARAN BERITA POLITIK DI HARIAN DISWAY. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi* (e-ISSN: 2807-6818), 4(02), Article 02. <https://doi.org/10.69957/relasi.v4i02.1583>
- Ginanjar, A. (2021, August 3). *Srawung Manfaat di Symbolic.id*. CakNun.com. <https://www.caknun.com/2021/srawung-manfaat-di-symbolic-id/>
- Gita Wirjawan (Director). (2021, November 24). *Keadilan (Token) Sosial Bagi Seluruh Talenta – Sabrang Mowo Damar Panuluh | Endgame #56* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=0JqvJ8oEvG0>
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Harnowo, T. (2020). PENERAPAN TEORI DISKURSUS HABERMAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 55. <https://doi.org/10.22146/jmh.45145>
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180–197. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>
- Keriapy, F. (2022). Pendidikan Agama Kristen dalam Ruang Publik Virtual: Sebuah Analisis Pemikiran Jürgen Habermas. *Harati: Jurnal Pendidikan Kristen*, 2(2), 116–126. <https://doi.org/10.54170/harati.v2i2.109>
- Manganti, G. S. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(11), Article 11. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Pitriadi, P., Iswar, M., M, M. I., & Mukhtar. (2025). *Dasar-Dasar Kelistrikan Alat Berat*. <https://www.revormasi.com/publications/619030/>
- Rizkiyah, I. D. (2025). Interaksi Manusia sebagai Makhluk Sosial dalam Ruang Publik menurut Jürgen Habermas: Studi Kasus Pameran Metamorfosis 6. *Abstrak : Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media Dan Desain*, 2(4), 23–32. <https://doi.org/10.62383/abstrak.v2i4.674>
- Rahmatunisa, W. (2017). Literasi Media Melalui Kajian Linguistik Fungsional di Indonesia. *FON: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(2). <https://doi.org/10.25134/fjpbsi.v11i2.726>
- Shirky, C. (2009). *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*. New York: Penguin Press.
- Setiawan, F. R. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas. *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 39(3), Article 3. <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826>
- Silitonga, R. (2022). Penerapan Pendekatan Komunikasi Intersubyektif Dari Jürgen Habermas Dalam Mengomunikasikan Ajaran Alkitab Dan Berita Injil: Sebuah Refleksi Teologis. *Manna Rafflesia*, 9(1), 110–125. https://doi.org/10.38091/man_raf.v9i1.265
- Solin, N. (2025). *Cerita Rakyat Pakpak Neur Anak-Anak*. Penerbit Revormasi | PT. Revormasi Jangkar Philosophia. <https://www.revormasi.com/publications/618710/>
- Srihono, A., & Magalhaes, L. (2024). Model Peningkatan Kualitas Ruang Publik yang Inklusif dalam Mendukung Perekonomian Daerah. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), 66–79. <https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.13179>

- Teja, W. A. (2025). *Kebijakan Ambivalen Mao Zedong Terhadap Pengobatan Tradisional Tiongkok: Antara Revolusi dan Tradisi*. Penerbit Revormasi | PT. Revormasi Jangkar Philosophia. <https://www.revormasi.com/publications/618924/>
- Tullah, R. (2024). *Logika dan Algoritma Pemrograman dengan Python dan Thonny IDE*. Penerbit Revormasi | PT. Revormasi Jangkar Philosophia. <https://www.revormasi.com/publications/618744/>
- Wiratno, T. A. (2024). *Kapitalisasi Estetik*. Penerbit Revormasi | PT. Revormasi Jangkar Philosophia. <https://www.revormasi.com/publications/618733/>
- Yardi, S., & boyd, d. (2010). Dynamic Debates: An Analysis of Group Polarization Over Time on Twitter. *Bulletin of Science, Technology & Society*, 30(5), 316–327.